**Bonus Demografi Dan Kerukunan Umat Beragama**

Oleh Yakobis Oktavianus, S.Sos.MM

Kepala Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT

**ABSTRAKSI**

*Bonus demografi dan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sebuah tema yang menarik untuk dibahas sebab tema ini sangat hangat di bicarakan oleh seluruh umat manusia di dunia termasuk di Indonesia. Menariknya tema ini membuat semua pihak berusaha menemukan benang merah untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat terkait bonus demografi yang akan dinikamti bangsa Indonesia. Berhadapan dengan mimpi masyarakat Indonesia menikmati bonus demografi situasi masyarakat Indonesia yang belum memberikan tanda – tanda mencapai kerukunan hidup umat beragama menjadi tantangan tersendiri. Fakta ini sepertinya akan mengalihkan konsentrasi masyarakat Indonesia pada upaya menciptakan kerukunan umat beragama sebelum menikmati bonus demografi. Seperti slogan tua yang mengatakan “ bersatu kita teguh bercerai kita runtuh “ slogan ini mengarahkan kita pada fakta – fakta intoleransi di bawah ini.*

***Kata Kunci : Kerukunan, Umat Beragama***

Bonus demografi dan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sebuah tema yang menarik untuk dibahas sebab tema ini sangat hangat di bicarakan oleh seluruh umat manusia di dunia termasuk di Indonesia. Menariknya tema ini membuat semua pihak berusaha menemukan benang merah untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat terkait bonus demografi yang akan dinikamti bangsa Indonesia. Berhadapan dengan mimpi masyarakat Indonesia menikmati bonus demografi situasi masyarakat Indonesia yang belum memberikan tanda – tanda mencapai kerukunan hidup umat beragama menjadi tantangan tersendiri. Fakta ini sepertinya akan mengalihkan konsentrasi masyarakat Indonesia pada upaya menciptakan kerukunan umat beragama sebelum menikmati bonus demografi. Seperti slogan tua yang mengatakan “ bersatu kita teguh bercerai kita runtuh “ slogan ini mengarahkan kita pada fakta – fakta intoleransi di bawah ini.

Setara Institut menuliskan bahwa Daerah Istimewah Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang memiliki kasus Intoleransi tinggi seperti yang di sampaikan oleh Halili Hasan bahwa “ kasus intoleransi di Yogyakarta meningkat lima tahun terakhir, dengan jumlah kasus sebanyak 37 kasus, kalau dilihat dari data dalam 12 tahun terakhir DIY tidak masuk pada urutan 10 besar, tetapi ketika ditilik pada lima tahun terakhir DIY menempati posisi ke enam.” Dari pernyataan ini ketika diurut kasus intoleransi yang menghentarkan DIY ada pada posisi keenam terlihat dari data sebagai berikut Jawa Barat 162 kasus, DKI Jakarta 113 kasus, Jawa Timur 98 kasus, Jawa Tengah 66 kasus, Aceh 65 kasus dan DIY sebanyak 37 kasus. Kasus – kasus tersebut meliputi Ahmadiyah, denominasi umat Kristen, Individu dan Syaiah, penyerangan gereja, masjid, rumah ibadah kepercayaan, vihara, klenteng, pura dan sinagog. Bagaimana dengan di NTT ? Tentunya kita bertanya mengapa yang penulis memilih DIY ? karena DIY adalah kota Pelajar artinya masyarakat yang tinggal di Yogyakarta sebagian besar memiliki wawasan luas. Sehingga dalam konteks tema di atas jika DIY saja kasus intoleransinya meningkat bagaimana dengan daerah lain?

Kompas com menuliskan bahwa pada tanggal 25 September 2023 terjadi perkelahian yang mengakibatkan Yohans Don Bosko Padalani seorang Mahasiswa meninggal akibat perkelahian, penyebab perkelahian hanyalah salah paham. Selain itu akhir – akhir ini di Kupang sering terjadi perkelahian yang menyebabkan korban, baik itu korban nyawa maupun korban materi, seperti yang terjadi baru – baru ini, di depan BRI Oesapa dan pembakaran beberapa unit kendaraan roda dua di depan Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Dua contoh ini menjadi indicator bahwa intoleransi dan disharmonisitas di Kupang patut dipertanyakan kembali padahal Provinsi NTT disebut – sebut sebagai Provinsi dengan predikat terbaik dalam kaitan dengan kerukunan dan toleransi. Apakah benar demikian…? Fakta – fakta sederhana mendorong refleksi mendalam bagi seluruh komponen masyarakat di NTT untuk kembali meningkatkan kerukunan demi mencapai tujuan pembangunan nasional sekaligus menikmati bonus demografi yang sebentar lagi akan dinikmati. Sehingga tujuan tulisan ini adalah memberikan dorongan kepada semua pihak untuk meningkatkan kerukunan umat beragama demi menciptakan stabilitas keamanan Negara dan menanti menikmati bonus demografi. Akibat dari rukun dan damai, masyarakat akan bekerja dengan bebas dan menikmati seluruh hasil kerja di usia produktif maupun saat purna produktif yang dikenal dengan istilah bonus demografi.

Seorang ahli bernama Malthus pada tahun 1798 dalam sebuah buku yang berjudul Essay on the principle of population mengatakan bahwa “ pertumbuhan populasi manusia yang cepat akan terus melampaui basis sumber dayanya, sehingga menyebabkan siklus pertumbuhan populasi yang tidak terhindarkan dan diikuti dengan penurunan, dengan krisis kematian dan penurunan kesuburan yang menyamanak kedudukan. Populasi setiap kali pertumbuhannya melampaui daya dukung lingkungan atau ketika daya dukung lingkungan menurun. Akibatnya, pertumbuhan populasi manusia dalam jangka panjang sangat rendah, meski tidak nol.” Dari pernyataan Malthus di atas dapat kita pahami bahwa kesenjangan Antara usia produktif dan usia non produktif adalah fakta yang tidak terhindarkan atau dengan kata lain bonus demografi adalah kondisi alami yang akan dihadapi suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia.

Apakah yang dimaksudkan dengan bonus demografi ? Ratu Matahari dkk dalam buku ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi memahami bonus demografi sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil turunnya fertilitas jangka panjang.” Ratu Matahari dkk memahami bahwa bonus demografi sebagai berkurangnya usia non produktif dari usia produktif dalam masyarakat Indonesia atau dengan kata lain beban masyarakat berkurang karena masyarakat usia lansia sudah berkurang atau dengan kata lain masyarakat yang masih bekerja lebih banyak dari masyarakat yang tidak dapat bekerja karena faktor usia. Pertanyaannya pada usia berapakah seseorang dikatakan sebagai usia produktif ? Beberapa ahli sepakat bahwa usia produktif yang dimaksud berkisar antara usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun.

Bonus demografi pada sisi ekonomi merupakan keuntungan bagi masyarakat Indonesia sebab bertambahnya usia produktif artinya bertambahnya masyarakat usia kerja. Atau dengan kata lain masyarakat Indonesia pada usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun lebih banyak sehingga mampu melakukan kegiatan – kegiatan produktif yang menambah atau meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negaraa. Pertanyaan pentingnya apakah benar bahwa di usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun masyarakat di NTT mampu melakukan tindakan produktif demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat ? Pertanyaannya lainnya tahun berapakah Bangsa Indonesia akan menikmati Bonus Demografi ?

Data statistik pertumbuhan masyarakat Indonesia memberikan gambaran bahwa bonus demografi akan dinikmati antara tahun 2030 sampai dengan 2040. Jika diurutkan waktu dari sekarang, maka kurang lebih sisa 7 (tujuh) tahun masyarakat Indonesia termasuk masyarakat NTT akan menikmati bonus demografi. Jika dihubungkan dengan pengertian bonus demografi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 masyarakat Indonesia di usia 15 tahun sampai 64 tahun lebih banyak atau sekitar 70 – 80 % total penduduk yang ada di Indonesia. Pertanyaannya apakah benar bahwa pada tahun itu anak – anak usia 15 tahun sudah mampu melakukan kegiatan produktif ? jangankan anak – anak usia 15 tahun orang dewasa saja apakah sudah mampu melakukan kegiatan produktif ? jika kita runut dari sekarang, pada tahun 2030, anak yang berusia 12 tahun di tahun 2023 atau setingkat SMP Kelas I sudah mencapai usia 22 tahun. Pertanyaannya apakah mereka sudah mampu bekerja ? sementara untuk tahun ini saja tingkat pengangguran di NTT masih cukup tinggi ? bagaimana mungkin di tahun 2030 pengangguran akan menurun? apakah dengan model kurikulum merdeka belajar mampu memupuk jiwa kerja siswa – siswi?

Beberapa pertanyaan di atas menjadi bahan refleksi mendalam bagi seluruh komponen masyarakat untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar mampu memaksimalkan bonus demografi di atas seperti yang dikatakan oleh Muhadjir Effendy bahwa “ melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai. Maka dari itu, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai lapangan pekerjaan dan membuka keran investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.” Faktanya benar bahwa pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berbenah diri membuka lapangan kerja, misalnya penerimaan CPNS dan P3K yang sudah dilakukan sejak tahun lalu walaupun belum banyak kuaota yang disediakan; ada berbagai perusahan – perusahan baru yang dibuka di berbagai tempat di Indonesia, terus mengucurkan dana KUR untuk UMKM di masyarakat dst.

Dengan demikian salah satu syarat menikmati bonus demografi adalah memiliki SDM yang produktif. Supaya memiliki SDM yang produktif maka lembaga pendidikan di Indonesia mestinya menjadi tempat pertama mempersiapkan SDM dengan mutu pendidikan yang baik. Pertanyaannya apakah dengan menggunakan kurikulum merdeka belajar memberikan jaminan agar SDM masyarakat Indonesia meningkat atau minimalnya menanamkan kesadaran pada siswa / I untuk mampu menciptakan lapangan kerja daripada menunggu dipekerjakan ? jawaban dari pertanyaan ini perlu dikaji lebih komprehensi oleh para pendidik dan pakar – pakar pendidikan. Saran sederhana hendaknya kurikulum merdeka belajar dimanfaatkan secara baik oleh guru dalam mendesain model pembelajaran agar siswa mampu melakukan eksplorasi alat – alat sederhana dari bahan yang ada bukan menikmati barang jadi. Misalnya anak diarahkan membuat mobil – mobilan dari bahan bekas seperti botol bekas minyak bimoli, dengan ban dari sandal bekas dst. Walau demikian seperti kata Muhadjir Effendy “ tugas Negara adalah mengintervensi, menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi. Jadi investasi baik menggunakan dana dalam negeri maupun luar negeri, termasuk mengundang pemilik modal asing masuk Indonesia itu sebetulnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi produktif.”

Syarat lainnya adalah stabilitas keamanan Negara. Salah satu kunci stabilitas keamanan Negara adalah kerukunan umat beragama. Bagaimana mungkin masyarakat menikmati bonus demografi apabila umat beragama masih saling sikut menyikut, masih saling mencari kesalahan yang berujung pada disharmoni antar umat beragama ? Setuju dengan pandangan Pdt Dr. A A Yewangoe bahwa “ rasanya para penganut agama – agama memperoleh tantangan yang tidak kecil sebagai dampak dari perubahan – perubahan yang begitu cepat ini, kalau mereka sibuk berkelahi dengan sesamanya maka tantangan – tantangan itu sulit dihadapi. Bahkan bukan tidak mungkin, dapat mengakhiri keberadaan umat manusia itu sendiri.” Dalam konteks tema kita di atas rasanya juga sulit menikmati bonus demografi kalau umat beragama masih saling berkelahi, bahkan bangsa ini tidak mungkin menikmati bonus demografi. Nasihat Hans Kueng tepat bagi kita untuk menikmati bonus demografi, ia mengatakan bahwa “ untuk saat memasuki millennium ke-3 ini tidak ada satu pun agama ada bagi dirinya sendiri “ peace among the religion is the prepequisite for peace among the nasions.

Setiap umat beragama memiliki prinsip dasar melaksanakan kerukunan hidup umat beragama, seperti dalam agama Islam kerukunan umat beragama meliputi aspek akidah, ibadah dan muamalah. Demikian juga dengan umat Kristen dan Katolik kerukunan umat beragama merupakan ekspresi dari dua lapisan cinta kasih, lapisan pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan lapisan kedua kasih terhadap sesama manusia seperti diri sendiri. Bagi Agama Hindu kerukunan umat beragama dilandasi oleh pandangan “ Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, demikian juga dengan agama – agama lainnya yang tidak sempat dituliskan di sini. Dengan demikian kerukunan umat beragama menjadi pintu masuk menikmati bonus demografi. Orang dapat menikmati bonus yang diberikan setelah situasi hidup masyarakat menjadi damai sejahtera. Tidak mungkin menikmati bonus kalau situasi kehidupan masyarakat masih kacau balau (chaos).

Kalau demikian dapatkah bonus demografi dinikmati bangsa Indonesia daris sisi kerukunan umat beragama ? berdasarkan data – data tertulis di atas trend akan menikmati bonus demografi besar kemungkinannya sebab stabilitas kerukunan umat beragama cukup baik. Artinya kasus – kasus intoleransi dalam kehidupan masyarakat tetap ada tetapi selalu dapat di atasi dengan baik. Hal ini tercapai berkat kesadaran umat beragama tentang pentingnya kerukunan umat beragama cukup baik. Kesadaran bahwa semua agama memiliki intisari yang sama yaitu cinta kasih. Cinta kasih tidak mesti satu agama tetapi berbeda agama pun bisa. Sesama umat manusia adalah ladang terbaik mengimplementasikan cinta kasih kepada Tuhan. Prinsip dasar ini lahir dari pemahaman bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Walau Tuhan yang dipahami setiap orang berbeda, karena perbedaan pemahaman tentang Tuhan adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Marilah kita persiapkan diri menikmati bonus demografi.